



PROSIDING PERTEMUAN ILMIAH TAHUNAN (PIT) XVI IKATAN GEOGRAF INDONESIA (IGI)

Banjarmasin 2-3 Nopember 2013



**MEMPERKOKOH KESADARAN SPASIAL
KEPEMIMPINAN NKRI MENGHADAPI
TANTANGAN GLOBAL**



Penyelenggara Kegiatan

Ikatan Geograf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Pendidikan Geografi-FKIP
Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H. Hassan Basry Kotak Pos 87 Banjarmasin 70123

2013



Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan XVI
IKATAN GEOGRAF INDONESIA
Banjarmasin 2-3 Nopember



2013

Katalog Dalam Terbitan; Perpustakaan nasional Indonesia; Memperkokoh Kesadaran Spasial
Kepemimpinan NKRI Untuk Menghadapi Tantangan Global

ISBN 978-602-1322-00-0

Judul Buku : Memperkokoh Kesadaran Spasial Kepemimpinan NKRI Untuk Menghadapi Tantangan
Global

Penyusun :

IKATAN GEOGRAF INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Perancang Sampul:

Hasa Noor Hasadi
Muhammad Zainuddin
Muhammad Muhaimin

Editor:

Prof. Dr. Suratman., M.Sc. (Ketua Umum IGI Pusat)
Nasruddin, M.Sc. (Ketua Umum IGI Kalimantan Selatan)
Dr. Asep Karsidi, M.Sc. (Dewan Pembina IGI Pusat)
Prof. Dr. Aris Poniman (Dewan Pembina IGI Pusat)
Drs. Wahyu Utomo, M.Si. (Dewan Pembina IGI Provinsi Kalimantan Selatan)

Penerbit :

PT. Pro Fajar Jakarta

Hak cipta ada pada penulis dan dilindungi Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2002, pasal 72 tentang HAK CIPTA.
Dilarang memperbanyak buku ini, tanpa ijin dari Penulis dan Penerbit



Dinamika dan Integrasi Makro Ekonomi Global Nasional serta Potret Ekonomi Regional Kalimantan <i>Ahmad Alim Bachri</i>	601
Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Indek Pembangunan Manusia untuk Penyusunan Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan <i>Lutfi Muta'ali</i>	606
Masyarakat Tangguh Bencana dalam Geostrategis Indonesia <i>Djati Mardiatno</i>	621
Dicari Presiden RI yang Bervisi Geografis <i>Al. Susanto</i>	628
Pemindahan Ibukota RI ke Pulau Kalimantan (Analisa Geostrategis NKRI) <i>Nasruddin</i>	636
Pembekalan 'Map' Reading Guna Peningkatan Kesadaran Geografis Peserta Pendidikan Kepemimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Dalam Rangka Ketahanan Nasional <i>Sukendra Martha</i>	645
Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Beranda Depan NKRI <i>Nasruddin., Wahyu Utomo., Lutfi Muta'ali., Su Ritohardoyo., R. Suharyadi., Aris Poniman</i>	652
Indonesia Sebagai Peristiwa, Fakta dan Nilai Geosfera <i>Momon Sudarma</i>	666
Pembakuan Nama Rupabumi Sebagai Bagian Geostrategis NKRI <i>Aji Putra Perdana</i>	675
Pemahaman Keruangan Dalam Konteks Memperkokoh Wawasan Nusantara <i>Rudiono</i>	686
Kajian Geografis Satuan-Satuan Tanah Super Tebal di Indonesia <i>Junun Sartohadi</i>	694
Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembangunan Pedesaan <i>Eva Alviawati</i>	703
Falsafah "Memayu Hayuning Bawana" Sebagai Potensi Geostrategis dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam <i>Nurul Khotimah</i>	709
Delta Barito Sebagai Sumberdaya Kepesisiran di Kalimantan <i>Deasy Arisanty., Junun Sartohadi., Muh. Aris Marfai., Danang Sri Hadmoko</i>	717
Pengaruh Status Migrant Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Remitansi dan Daerah Asal <i>Budijanto</i>	721

**Pemindahan Ibukota RI Ke Pulau Kalimantan
(Analisa Geostrategis NKRI)**

Nasruddin

Staf Pengajar Prodi Pendidikan Geografi Unlam
Email: nasruddin_luthfie@yahoo.co.id.

ABSTRAK

Ide awal pemindahan ibu kota RI telah ada sejak Presiden pertama Ir Soekarno tahun 1950-an jauh sebelum maraknya pembangunan dan semakin rendahnya daya dukung Kota Jakarta. Alternatif wilayah yang ditawarkan saat itu yakni 3 (tiga) kota meliputi: Palangkaraya, Bogor dan Makassar. Namun akhirnya Bogor tak dipilih karena terlalu dekat dengan Jakarta. Sementara Makassar, adalah kota yang telah berkembang, dan puncaknya adalah Palangkaraya yang merepresentasikan rentang kendali NKRI karena relatif berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Beberapa pertimbangan Ir. Soekarno yakni: 1) Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia; 2) menghilangkan sentralistik Jawa; dan 3) pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda (non orisinil).

Usulan pemindahan ke Kalimantan dapat dilihat dari aspek nilai geostragis NKRI yang utama adalah nilai efektivitas rentang kendali pada seluruh wilayah NKRI. Beberapa nilai tersebut diantaranya: *Pertama*, Kalimantan, adalah kawasan tengah Indonesia, yang membuat biaya pergerakan dari Pulau Jawa yang dihuni oleh 59% penduduk nasional tidak terlalu tinggi. *Kedua*, Kalimantan adalah sumber utama bahan baku energi nasional, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. *Ketiga*, sumber air memadai untuk kebutuhan jangka panjang, sejauh program pelestarian lingkungan berjalan baik dan teknologi pengolahan air digunakan sebagaimana mestinya. *Keempat*, Kalimantan merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia bersama Papua. *Kelima*, Kalimantan adalah pulau yang paling aman dari ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. *Keenam*, Kalimantan adalah salah satu wilayah yang mengalami proses pertumbuhan dan sirkulasi modal yang tidak adil dan sangat tidak seimbang di Indonesia.

Kata Kunci: Pemindahan Ibukota, Geostrategis NKRI, Kalimantan

Pendahuluan

Makalah ini mencoba menelaah tentang ide pemindahan ibukota RI dari Jakarta ke Kalimantan dari aspek geostrategis NKRI. Ibu kota memegang peran sentral dalam memainkan peran pengelolaan wilayah keseluruhan penjuru NKRI oleh karena ibu kota negara tidak dapat dilepaskan dari kenyataannya dalam hal geoposisi, geoekonomi, dan geopolitik baik regional maupun global.

Pemindahan ibu kota suatu negara di berbagai negara merupakan hal yang lazim terjadi dengan berbagai sistem misalnya Jepang, ibu kota negara adalah Tokyo, ibukota Pemerintahan berada di Kyoto, Malaysia Ibukota Negara berada di Kuala Lumpur, sementara Ibukota pemerintahan berada di Penang. Amerika Serikat, Ibukota Negara berada di New York, sementara Ibukota Pemerintahan berada di Washington DC. Ide pemindahan ibu kota RI telah ada sejak Presiden pertama Ir Soekarno tahun 1950-an jauh sebelum maraknya pembangunan dan semakin rendahnya daya dukung Kota Jakarta. Sejarawan Anhar Gonggong (Kompas.com, 2013) mengungkapkan, seandainya tidak ada peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 (G 30S), saat ini pusat pemerintahan Indonesia sudah berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hal ini didasarkan bahwa ide pemindahan telah diprogramkan melalui program pembangunan berencana semesta.

Ir. Soekarno merancang pemisahan antara pusat pemerintahan dan ekonomi. Namun akhirnya rencana tersebut tak terwujud karena rezim Soekarno berakhir dan digantikan oleh rezim orde baru Soeharto. Alternatif wilayah yang ditawarkan saat itu yakni 3 (tiga) kota meliputi:

Palangkaraya, Bogor dan Makassar. Namun akhirnya Bogor tak dipilih karena terlalu dekat dengan Jakarta. Sementara Makassar, memiliki keunggulan karena relatif berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Namun Makassar kota yang telah lama terbentuk, sementara Ir. Soekarno menginginkan kota baru yang memang dipersiapkan untuk pusat pemerintahan, hingga akhirnya Palangkaraya adalah alternatif yang sangat memungkinkan dari berbagai sudut pandang. Beberapa pertimbangan Ir. Soekarno dalam menetapkan Kota Palangkaraya sebagai berikut: 1) Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia; 2) menghilangkan sentralistik Jawa; 3) pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda (non orisinil). Ir. Soekarno dalam acara peresmian awal sebagai tonggak pembangunan kota Palangkaraya 17 Juli 1957 menyampaikan "Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model", seperti Jakarta yang punya Ciliwung, Palangkaraya punya sungai Kahayan. Model yang ditawarkan Ir. Soekarno yakni ingin memadukan konsep transportasi sungai dan jalan raya, seperti di negara-negara lain beliau menginginkan Sungai Kahayan secantik sungai-sungai di Eropa, di mana warga dapat bersantai dan menikmati keindahan kota yang dialiri sungai.

"Janganlah membangun bangunan di sepanjang tepi Sungai Kahayan. Lahan di sepanjang tepi sungai tersebut, hendaknya diperuntukkan bagi taman sehingga pada malam yang terlihat hanyalah kerlap-kerlip lampu indah pada saat orang melewati sungai tersebut,"

Untuk mewujudkan ide itu Soekarno bekerjasama dengan Uni Soviet. Para insinyur dari Rusia pun didatangkan untuk membangun jalan raya di lahan gambut. Pembangunan ini berjalan dengan baik. Tapi seiring dengan terpuruknya perekonomian Indonesia di awal 60an, pembangunan Palangkaraya terhambat. Puncaknya pasca 1965, Soekarno dilengserkan. Soeharto tak ingin melanjutkan rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan. Jawa kembali jadi sentral semua segi kehidupan.

Beberapa wilayah alternatif pemindahan ibukota selain yang diungkapkan Ir. Soekarno juga pernah diajukan pada era Orde Baru Presiden Soeharto dengan mengusulkan Jonggol salah satu Kecamatan di Kabupaten Bogor sebagai lokasi alternatif ibu kota, selanjutnya Desember 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah mengusulkan masalah perpindahan ibukota ini. Salah satu yang mengemuka adalah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (www.sijanggut.blogspot.com). Pada Era Habibie juga mencuat wacana untuk memindahkan ibukota Negara ke Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan alasan kota tersebut merupakan titik tengah Indonesia.

Tahun 2013 hasil kajian awal pemindahan ibukota negara yang dilakukan oleh Velix Wanggai Staf Khusus Presiden Bidang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah menghasilkan tiga pilihan yaitu; pembenahan secara total Jakarta, pemindahan pusat pemerintahan dari ibukota negara, dan memindahkan ibukota secara total. Ketiga pilihan skenario tersebut ini bisa disebut sebagai skenario realistik, moderat dan radikal.

- 1) Opsi pertama adalah pembenahan secara total Jakarta (*skenario realistik*), seperti wacana 17 langkah yang telah diputuskan oleh Wakil Presiden Boediono. Untuk mengatasi kemacetan kota Jakarta menggunakan langkah jangka pendek dan jangka panjang.
- 2) Opsi kedua adalah memindahkan pusat pemerintahan dari kota Jakarta (*skenario moderat*) menuju kota lain yang tidak terlalu jauh. Untuk Ibukota negara masih tetap di Jakarta, sedangkan pusat pemerintahan di kota baru yang akan ditentukan kemudian. Pertimbangan jarak dengan ibukota negara Jakarta tentu akan menjadi pertimbangan penting terkait akses dan mobilitas.
- 3) Opsi ketiga adalah memindahkan pusat pemerintahan dan memindahkan ibukota negara (*skenario radikal*), jadi nantinya Jakarta akan dijadikan pusat bisnis dan hiburan saja. Kota pilihan yang bisa sebagai pusat pemerintahan saja atau bahkan menjadi ibukota negara yang baru bisa jadi wilayah di sekitar Jakarta misalnya seperti Jonggol,

salah satu kecamatan di kabupaten bogor, Jawa Barat. Atau menggunakan pilihan lain yaitu tetap berada di pulau Jawa, seperti Banten, Purwekerto, Magelang, Karawang, Yogyakarta atau Malang. Atau sekalian pindah ke luar Pulau Jawa seperti kota Palembang, Palangkaraya, Makassar atau bahkan Papua.

Aspek Utama dalam Pemindahan Ibukota

Aspek geostrategis dalam pemindahan ibu kota dapat dilihat dari berbagai hal diantaranya geografis (posisi), ekonomi, sosial politik dan hankam.

Aspek Geografis

Letak geografis, merupakan pertimbangan fundamental yang sangat utama, hal ini dikarenakan Indonesia adalah daerah yang rawan bencana alam. Melihat dari aspek geografis maka Pulau Kalimantan yang dilintasi oleh garis katulistiwa layak direkomendasikan menjadi ibu kota negara. Garis khatulistiwa membagi pulau Kalimantan atas Kalimantan belahan bumi utara dan Kalimantan belahan bumi selatan. Kesuburan tanah di pulau Kalimantan kurang bila dibanding kesuburan tanah di pulau Jawa dan pulau Sumatera, demikian pula kepadatan penduduknya tergolong jarang. Pulau Kalimantan sama halnya pulau Sumatera, diliputi oleh hutan tropik yang lebat (primer dan sekunder). Secara geologik pulau Kalimantan stabil, relatif aman dari gempa bumi (tektonik dan vulkanik) karena tidak dilintasi oleh patahan kerak bumi dan tidak mempunyai rangkaian gunung berapi aktif seperti halnya pulau Sumatera, pulau Jawa dan pulau Sulawesi. Sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas, 1.125 kilometer, berada di pulau Kalimantan. Selain itu, penataan ibu kota tanpa merusak lingkungan alam seperti penyediaan hutan kota dan tanah resapan sangat perlu ditekankan, jika tidak hanya menimbulkan pemindahan banjir dari Jakarta ke luar daerah. Kalimantan dengan letak diantara jalur pelayaran internasional yang besar dan letak geografis di tengah-tengah Indonesia dapat menjadi pertimbangan untuk menjadi ibu kota selanjutnya. Dari aspek geografis saat ini Pulau Kalimantan sangat layak direkomendasikan sebagai ibu kota negara Indonesia. Namun perlu dilakukan uji kelayakan dan analisis mendalam untuk mengembangkan daerah tersebut menjadi ibu kota negara agar pengalaman dalam mengembangkan ibu kota di Jakarta tidak terulang kembali.

Aspek geografis tentunya akan memainkan peran penting dalam menciptakan kota lestari. Membangun Kota Lestari tentunya tidak dapat diserahkan semata kepada sektor swasta yang berorientasi keuntungan. Kota Lestari mengandung misi-misi permukiman berkelanjutan yang hanya dapat dijalankan dengan kepemimpinan sektor publik yang kuat dan didukung sektor swasta dan masyarakat secara sinergis. Sebagai model Kota Lestari di tanah air, ibukota baru adalah simbol Indonesia Baru dengan segala kebaikan pembangunan kota dan penataan permukimannya. Ibukota baru direncanakan menampung kepadatan penduduk yang terencana hingga berjumlah lebih kurang 1 juta penduduk saja. Ibukota baru sebagai model kota lestari adalah ajang diterapkannya berbagai pendekatan pengembangan permukiman dan kota yang belum berhasil diwujudkan hingga kini, seperti:

- 1) Penataan ibukota pusat pemerintahan atau *civic center* yang terpadu dengan fungsi-fungsi permukiman, pusat pendidikan, pusat penelitian, kawasan industri jasa, dan rekreasi serta didukung sistem transportasi, prasarana permukiman dan fasilitas-fasilitas kota yang memadai (Revisi UU 29/2007 tentang Ibu Kota Negara);
- 2) Manajemen kota yang kuat dan mampu mengendalikan pemanfaatan ruang-ruang kota dan wilayahnya secara efektif (Implementasi UU Penataan Ruang 26/2007);
- 3) Pengembangan sistem transportasi publik yang terpadu inter-moda dan terpadu dengan pusat-pusat aktivitas kota berdasarkan konsep TOD (*Transit Oriented Development*);
- 4) Pengembangan integrated urban infrastructure management;
- 5) Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun (Implementasi UU 4/1992 dan PP 80/1999);
- 6) Pembangunan kota terpadu dengan penyediaan perumahan yang layak bagi seluruh warganya, melalui pengembangan permukiman campuran multistrata yang bebas dari eksklusivisme lingkungan permukiman;

- 7) Pengembangan permukiman berbasis komunitas (*community housing*);
- 8) Penerapan konsep green building, sustainable landscape dan juga *sustainable settlements*;
- 9) Pembangunan kapasitas dan pengembangan kelembagaan (*capacity building and institutional development*) pengelolaan Ibukota NKRI.

Selain itu aspek geografis juga memainkan peran utama dalam menciptakan dan menata kota yang berkualitas sebagai kota global. Kota global adalah kota yang memiliki tata ruang, morfologi, pola transportasi dan pola pemukiman yang efisien dan memiliki ruang yang cukup untuk kepentingan publik, seperti jalur pejalan kaki, pengendara sepeda, hutan kota, taman kota, pantai publik dan sebagainya, yang tidak mungkin bisa kita dapatkan lagi di Jakarta dan sekitarnya. Untuk pola pemukiman dan perumahan, kota global mutlak didominasi oleh hunian vertikal dengan lingkungan tertata yang hemat lahan dan berlokasi tidak jauh dari kegiatan warga kota di siang hari. Di kota yang betul-betul dirancang khusus ini pula, pemerintah bisa menerapkan kebijakan yang memaksa arga inti kota untuk memulai nilai-nilai hidup baru dalam bermukim dan bertempat tinggal, karena penghuni kota ini sebagian besar adalah 400 ribu pegawai pemerintah pusat.

Aspek Ekonomi

Posisi ibu kota harus bisa menjadi daya magnet ekonomi yang berkesinambungan maksudnya ibu kota negara harus memberikan kemudahan dalam pembangunan ekonomi. Meskipun begitu ada beberapa pengecualian berhubungan dengan pusat pemerintahan serta pusat ekonomi suatu ibukota dengan alasan-alasan tertentu. Di Belanda, ibu kota menurut undang-undang adalah Amsterdam, tetapi kota pemerintahan adalah Den Haag. Di kota terakhir ini pula terdapat perwakilan-perwakilan dari negara asing. Dan yang paling dekat dengan kita adalah Malaysia, Ibu kota resmi Malaysia adalah Kuala Lumpur. Di kota ini pula parlemen, Yang Dipertuan Agong dan perwakilan-perwakilan negara asing berada. Tetapi kantor perdana menteri berkedudukan di Putrajaya. Melihat dari pengalaman perpindahan ibu kota di negara-negara lain maka ibu kota yang dipindahkan adalah pemindahan dari pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Sehingga ibu kota tidak terbebani oleh dua hal yang sebetulnya dapat dipisahkan dan tentunya dapat meningkatkan efektivitas dari kinerja ekonomi dan kinerja pemerintahan. Sektor ekonomi biasanya terdiri dari Usaha Kecil Menengah (UKM) sampai dengan Perusahaan-perusahaan baik lokal maupun investor asing. Jika terjadi pemindahan ibu kota maka pusat pemerintahan tersebut akan lebih mudah untuk dipindahkan ke daerah lain. Karena sektor ekonomi akan sangat sulit jika dipindahkan, maka diharapkan Jakarta sebagai pusat perekonomian saja.

Aspek Sosial Politik

Pemindahan ibu kota ke luar Jawa dan Indonesia bagian timur (IBT) akan menggeser episentrum pembangunan nasional dari Jawa dan Indonesia bagian barat (IBB). Ini akan menjadi sebuah langkah dan peluang pemerataan pembangunan ke IBT untuk memberi kesempatan lebih besar bagi berkembangnya wilayah luar Jawa. Pemindahan Ibu Kota adalah strategi untuk meredakan ketegangan-ketegangan dalam proses membangun yang selama ini mengalirkan energi secara tidak adil dan merata. Indonesia sangat memerlukan pembangunan *growth pole* lain di luar Pulau Jawa guna menetralisasi potensi gaya sentrifugal Jawa yang membuat ekonomi jangka panjang tidak efisien dan makin tidak berkualitas. Saat ini, 80 persen industri nasional berlokasi di Jawa. Sementara, sebagian besar bahan penghasil energi listrik dan energi panas bagi industri-industri tersebut didatangkan dari luar Pulau Jawa. Pada saat yang sama, konsentrasi industri di Jawa itu juga terus menyusutkan lahan-lahan pertanian di Jawa yang merupakan lahan pertanian paling subur di Indonesia. Pihak Badan Pusat Statistik melaporkan (tanggal 1 Juli 2010) bahwa setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian di Jawa seluas 27 juta hektar.

Aspek Hankam

Pada era perang dunia, ibu kota merupakan kunci dari suatu pertahanan negara secara nasional. Jika ibu kota negara jatuh ditangan musuh, maka negara tersebut otomatis 70% telah dapat dikuasai. Melihat dari sejarah tersebut, maka perlu adanya posisi ibu kota yang terletak di posisi sentral, sebagai pusat kendali militer dari darat, laut dan udara. Selain itu jika posisi ibu kota negara terletak di posisi sentral maka pengembangan pembangunan dapat dilakukan secara merata. Dengan kondisi Indonesia yang berupa negara kepulauan, apabila ibu kota negara Indonesia berpindah maka selain pemerataan pembangunan, maka dapat dirancang kembali sistem pertahanan yang lebih tertata dan modern. Indonesia dengan luas sebagian besar adalah lautan, sangat perlu dikoordinasi kembali bagaimana sistem pertahanan laut yang baik yang sampai sekarang ini masih mengalami kendala akibat minimnya koordinasi dengan pulau-pulau terluar di Indonesia. Dengan adanya wacana pemindahan ibu kota diharapkan dapat menjadikan pembangunan pulau terluar lebih berkembang maju sehingga tidak dapat direbut negara lain.

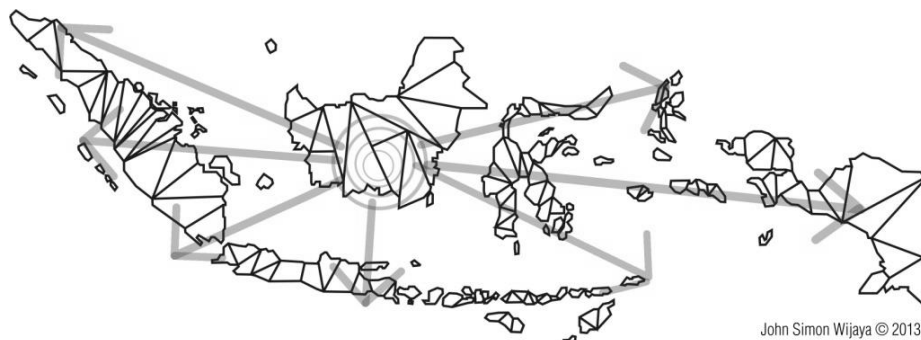
Geostrategis Kalimantan

Usulan pemindahan ibu kota ke Kalimantan harus diletakkan dalam agenda membangun *multigrowth pole* nasional yang selanjutnya diiringi oleh agenda membangun *multigrowth pole* perwilayah. Ibu kota yang baru karena posisi dan lokasinya akan berada dalam jaringan kota-kota nasional yang sehat, seimbang, saling memperkuat dan membentuk tatanan kewilayahan yang harmonis. Dengan bentuk jaringan baru kota-kota nasional, dalam jangka panjang akan tercipta efisiensi ekonomi nasional karena tiap jenis industri berada relatif di dekat sumber bahan energi dan bahan baku yang dibutuhkan. Kota-kota besar serta kota-kota industri di Jawa juga terhindar dari kongesti bongkar muat pelabuhan laut, kongesti traffic penerbangan, dan kemacetan lalu lintas di jalan raya.

Usulan pemindahan ke Kalimantan juga telah mempertimbangkan manfaat agregat dibanding pemindahan ke lokasi lain. *Pertama*, Kalimantan, adalah kawasan tengah Indonesia, yang membuat biaya pergerakan dari Pulau Jawa yang dihuni oleh 59% penduduk nasional tidak terlalu tinggi. *Kedua*, Kalimantan adalah sumber utama bahan baku energi nasional, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. *Ketiga*, sumber air memadai untuk kebutuhan jangka panjang, sejauh program pelestarian lingkungan berjalan baik dan teknologi pengolahan air digunakan sebagaimana mestinya. *Keempat*, Kalimantan merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia bersama Papua. *Kelima*, Kalimantan adalah pulau yang paling aman dari ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. *Keenam*, Kalimantan adalah salah satu wilayah yang mengalami proses pertumbuhan dan sirkulasi modal yang tidak adil dan sangat tidak seimbang di Indonesia.

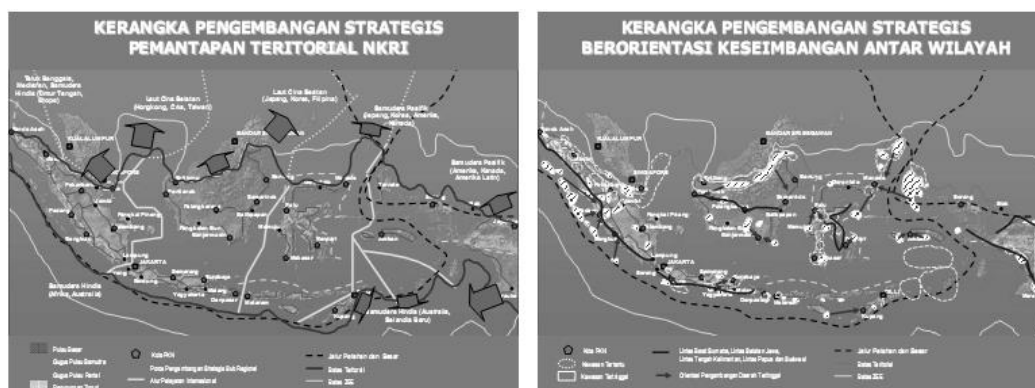
Dengan porsi jumlah penduduk yang hanya 5,6% persen dari total penduduk nasional, Kalimantan memberi kontribusi sebesar 9,3% terhadap PDB nasional. Sementara daerah lain, porsi sumbangannya terhadap PDB nasional hampir sama atau kurang dari porsi prosentase jumlah penduduknya terhadap nasional. Tetapi, yang lebih menyedihkan adalah, porsi investasi di Kalimantan terhadap total investasi nasional yang hanya 0,6%. Hal ini amat kontras dengan porsi investasi yang tertanam di Jawa yang besarnya mencapai 72,3% dari total investasi secara nasional. Ini jelas mengisyaratkan bahwa Kalimantan adalah daerah yang terancam tidak berkembang secara ekonomi karena sebagian besar pendapatan yang dihasilkan di daerah ini dibawa ke Jawa.

Amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 3 ayat 2, menyatakan pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Artinya, pemerintah Indonesia menyadari bahwa laut dan segala aktivitas di dalamnya dapat menjadi tumpuan masa depan bangsa. Kondisi geografis Indonesia yang terletak di tengah kepentingan masyarakat internasional, mengandung tingkat kerawanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk ancaman atau kejahatan terutama masalah keamanan perbatasan dan konflik teritorial.



John Simon Wijaya © 2013

Gambar 1. Kalimantan Episentrum NKRI



Gambar 2. Geo-Strategi dalam Pengembangan Penataan Ruang Nasional

Gambar 1 dan 2 menjelaskan bahwa secara geografis Indonesia hakikatnya adalah negara maritim sehingga diperlukan titik lokasi pemerintahan yang mampu memiliki daya jangkau pada seluruh wilayah NKRI. Sejarah kenusantaraan telah menjadi bukti bahwa kejayaan maritim mampu membawa nusantara dikenal dimancanegara misalnya kerajaan maritim Sriwijaya, Majapahit, Kerajaan Gowa dan beberapa kerajaan maritim lainnya. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat di Asia Tenggara, harus mendasarkan politik negara pada penguasaan alur pelayaran dan jalur perdagangan serta menguasai wilayah-wilayah strategis yang digunakan sebagai pangkalan kekuatan laut. Dalam konteks pertahanan laut, armada laut harus merepresentasikan sebagai negara maritim terbesar di dunia. Di sinilah geoposisi TNI AL, menjadi inisiator sekaligus garda terdepan untuk mengamankan posisi jati diri bangsa secara kultural dalam bingkai persepsi kewilayahan tanah dan air Indonesia. Menuntaskan jati diri bangsa sebagai penghuni negara kepulauan dan perlu mengedepankan visi dan strategi yang cerdas kreatif ke arah paradigma maritim yang rasional dan berwawasan global.

Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga dunia dengan luas sekitar 726.000 km sekitar 70% adalah wilayah NKRI. Secara geoposisi Pulau Kalimantan akan membawa implikasi positif pada rentang kendali NKRI tidak saja berdampak pada geoposisi yang handal bagi perkembangan Indonesia secara global. Pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan akan memberikan energi untuk memperkuat keberadaan Indonesia sebagai negara maritim dan mendukung misi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta pembangunan berkelanjutan. Dengan 2/3 luas wilayah yang terdiri dari lautan, selama ini pembangunan ekonomi di Indonesia justru berbasis daratan. Implikasinya, potensi ekonomi kemaritiman menjadi lenyap. Perekonomian maritim dalam wujud industri perkapalan, pengolahan ikan, pariwisata laut, energi air, transportasi air, dan lain-lain tidak berkembang. Problem ekonomi biaya tinggi di Indonesia selama ini antara lain disebabkan tingginya ongkos logistik yang bersumber dari inefisiensi transportasi laut (kapal). Demikian pula, masih belum maksimalnya ekspor Indonesia karena sangat tergantung dari komoditas darat (perkebunan dan lain-lain).

Seluruh problem itu akan dapat diurai jika perekonomian kita bergerak menuju pemanfaatan potensi maritim. Penempatan ibu kota di Kalimantan bagian selatan agak ke timur sangat tepat sebagai episentrum pengembangan ekonomi maritim nasional yang akan menggerakkan potensi ekonomi maritim di kawasan timur maupun barat Indonesia.

Tabel 1. Posisi Umum Kekuatan Masing-Masing Provinsi Kalimantan

No	Provinsi Kalimantan	Ibu Kota	Posisi Umum Kekuatan Ibukota Negara
1	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Provinsi yang lebih awal terbentuk di Pulau Kalimantan - Infrastruktur telah berkembang (++) - Aspek Sosial Budaya (SDM dan bahasa tersebar 60% ke wilayah Pulau Kalimantan)
2	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> - Diajukan Presiden RI Ir. Soekarno 1957 - Secara geografis terletak ditengah-tengah Pulau Kalimantan dan NKRI - Wilayah Luas
3	Kalimantan Timur	Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek historis (Kerajaan tertua Hindu Indonesia) - Infrastruktur telah berkembang (+++)
4	Kalimantan Barat	Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah luas - Infrastruktur telah berkembang (++) - Beranda depan NKRI
5	Kalimantan Utara	Tanjung Selor	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah luas - Beranda depan NKRI

Sumber: Analisis Nasruddin, 2013

Tim Visi Indonesia 2033 telah menegaskan bahwa usulan wilayah untuk lokasi Ibu Kota baru NKRI itu yang paling tepat adalah di wilayah Kalimantan, tetapi tidak di lokasi yang sudah tumbuh menjadi sebuah kota yang ramai. Tujuan utama memindahkan Ibu ke Kalimantan adalah agar setiap pemerintahan di masa mendatang bisa melangkah konsisten dan terhindar dari berbagai langkah paradoks dalam mencapai cita-cita bangsa yang ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan. Di satu sisi, pemindahan kota pusat pemerintahan Indonesia dan pusat kegiatan lembaga-lembaga negara ke salah satu lokasi di Kalimantan akan melahirkan episentrum baru yang mendekati sebagian besar kawasan tertinggal dan kawasan pinggiran yang selama ini tidak pernah efektif dibangkitkan lewat proyek-proyek pembangunan, seperti transmigrasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia dan sebagainya. Di sisi lain, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan memudahkan pemerintah menata kota Jakarta dan kota-kota besar lain di Jawa yang terus-menerus menjadi tujuan para migran baru dari desa-desa di Jawa dan dari berbagai daerah di luar Jawa, serta menghindari ketegangan yang makin tinggi akibat menurunnya daya dukung alam di Jawa dihadapkan dengan makin bertambahnya penduduk di Jawa yang saat ini sudah mencapai 59 persen dari total penduduk nasional. Muara dari dua sisi tadi akan berujung pada tujuan puncak dari pengelolaan negara bangsa Indonesia di masa depan, yakni pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan, dan lahirnya wajah Indonesia yang bisa dibanggakan.

Dengan kata lain, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan adalah sebuah aksi strategis diantara beberapa aksi strategis yang diperlukan untuk mewujudkan paradigma baru pembangunan yang selama ini hanya hadir sebagai wacana yang menggantung, karena ia memiliki perkiraan efek yang jelas. Pemindahan ibukota akan membawa konsekuensi positif bagi Kawasan Timur Indonesia yang relatif tertinggal dibandingkan Kawasan Barat Indonesia (KBI), hal ini diungkapkan anggota Tim Visi Indonesia 2033 [Andrinof Chaniago](#) (Tribunnews.com, 2013)

bahwa pembangunan ibu kota di Kalimantan menjadi anak tangga menuju Indonesia Timur yang lebih baik. "Dengan majunya Kalimantan, maka itu menjadi anak tangga untuk memajukan daerah Timur, yang juga tertinggal," lebih lanjut Andrinof Chaniago menjelaskan ada 15 (lima belas) alasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan sebagai berikut:

- 1) Pemindahan akan memudahkan penataan Jakarta dan kawasan mega-urban Jabodetabek.
- 2) Pemindahan menghentikan pemborosan ekonomi akibat kemacetan yang menyedot dana puluhan triliun rupiah setiap tahun.
- 3) Pemindahan ibu kota akan menyelamatkan lahan subur pertanian di Jawa dan menjaga konsistensi komitmen terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional.
- 4) Pemindahan menjadikan Indonesia memiliki kota publik kelas dunia untuk mendekati kesejajaran dengan negara-negara lain,
- 5) Pemindahan ibu kota juga mewujudkan rasa adil dan menghilangkan diskriminasi pembangunan antar wilayah di tataran nasional sebagai modal untuk memperkuat kembali rasa Satu Bangsa,
- 6) Pemindahan ibu kota juga memaksimalkan pemanfaatan potensi air dan sumber daya alam lainnya di Kalimantan yang terbuang percuma, dengan konsep pemanfaatan yang berkelanjutan,
- 7) Pemindahan ibu kota membangun anak tangga untuk mengefektifkan program percepatan pembangunan kawasan Timur Indonesia, daerah tertinggal, pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan,
- 8) Pemindahan menciptakan mesin penggerak keseimbangan antar-wilayah sebagai salah satu fondasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan yang diharapkan menjadi pendorong penyebaran pusat pertumbuhan,
- 9) Pemindahan ibu kota akan membawa berkah pada pemanfaatan potensi lahan menganggur seluas kurang lebih 12 juta hektare untuk membangun kota pusat pemerintahan dan kota-kota satelit dengan konsep *green development* dan *bioregion management*.
- 10) Pemindahan ibu kota juga menghentikan secara bertahap laju korban kecelakaan arus mudik di Jawa yang sudah hampir merenggut 1000 jiwa selama 14 hari pergerakan arus mudik.
- 11) Pemindahan juga akan membangun jalan yang efektif untuk menghidupkan ekonomi maritim dan perikanan dengan mendekatkan kota pusat pemerintahan ke kawasan perairan yang memiliki potensi besar di sektor maritim dan perikanan,
- 12) Pemindahan ibu kota ke Palangkaraya secara geografis tidak terlalu jauh dari kawasan pusat perekonomian nasional saat ini, sehingga mendukung usaha membangun *multi-growth pole* nasional yang diikuti *multi growth pole* wilayah untuk membangun perekonomian perekonomian nasional yang efisien,
- 13) Pemindahan ibu kota akan mendekatkan sumber bahan baku dan energi nasional. Kawasan Kalimantan selama ini juga dikenal paling aman dari gempa bumi.
- 14) Pemindahan ibu kota akan memperlihatkan konsistensi pemerintah dengan amanat rencana tata ruang wilayah nasional
- 15) Pemindahan ibu kota ke luar Jawa menekankan perlunya dekonsentrasi pembangunan di luar pulau Jawa.

Kesimpulan

- 1) Hasil kajian awal pemindahan ibukota negara menghasilkan tiga pilihan yaitu; pembenahan secara total Jakarta, pemindahan pusat pemerintahan dari ibukota negara, dan memindahkan ibukota secara total. Ketiga pilihan skenario tersebut ini bisa disebut sebagai skenario realistis, moderat dan radikal.
- 2) Pulau Kalimantan secara geostrategis lebih unggul untuk direkomendasikan sebagai ibu kota negara Indonesia diantaranya *Pertama*, Kalimantan, adalah kawasan tengah



Indonesia, yang membuat biaya pergerakan dari Pulau Jawa yang dihuni oleh 59% penduduk nasional tidak terlalu tinggi. *Kedua*, Kalimantan adalah sumber utama bahan baku energi nasional, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. *Ketiga*, sumber air memadai untuk kebutuhan jangka panjang, sejauh program pelestarian lingkungan berjalan baik dan teknologi pengolahan air digunakan sebagaimana mestinya. *Keempat*, Kalimantan merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia bersama Papua. *Kelima*, Kalimantan adalah pulau yang paling aman dari ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. *Keenam*, Kalimantan adalah salah satu wilayah yang mengalami proses pertumbuhan dan sirkulasi modal yang tidak adil dan sangat tidak seimbang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2010. Lahan Indonesia.
- Jakarta, **Kompas.com**. 2013. *Sejarawan: Tak Ada Peristiwa G-30 S, Ibukota RI Pindah ke Palangkaraya*
- Tribunnews.Com, Jakarta**, 2013. Alasan Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan
- Tim Visi Indonesia 2033**. *Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan: Lorong Keluar dari Berbagai Paradoks Pembangunan, Menuju Indonesia yang Tertata*. (http://www.visi2033.or.id/news_8.htm).
- Republika.Co.Id. 2011. *Soekarno Rancang Palangka Raya Jadi Ibu Kota Negara Sejak 1950-an* (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/11/23/lv471n-soekarno-rancang-palangka-raya-jadi-ibu-kota-negara-sejak-1950an>)
- Saidulkarnain Ishak. 2013. *Wacana Palangkaraya Jadi Ibu Kota Negara* (<http://www.patarlumbantoruan.com/2013/09/wacana-palangkaraya-jadi-ibu-kota.html#.UsghqfsmG1U>).
- Republika.co.id. 2011. Soekarno Rancang Palangkaraya Jadi Ibukota Negara Sejak 1950-an. (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/11/23/lv471n-soekarno-rancang-palangka-raya-jadi-ibu-kota-negara-sejak-1950an>).

Buku prosiding ini adalah kumpulan makalah narasumber dan peserta Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Geograf Indonesia XVI di Banjarmasin, didalamnya memuat aneka konsep, metode, dan aplikasi geografi dari masing-masing wilayah, sehingga buku ini adalah miniatur yang menggambarkan kebhinekaan obyek kajian dalam memberikan alternatif pemecahan masalah di wilayah NKRI.

Geografi adalah Ilmu yang mempelajari fenomena geosfer (obyek material) dengan pendekatan (obyek formal) yakni Keruangan (*Spatial*), Ekologi (*Ecological*), dan Kompleks Wilayah (*Regional Complex*)



Geografi sebagai gatra pertama dalam Astagatra Ketahanan Nasional adalah fakta bahwa prinsip geografi merupakan komponen sangat penting dalam membentuk karakter pemimpin bangsa, akan tetapi sangat ironis saat ini di dunia pendidikan kita yang sedang mengembangkan kurikulum baru tahun 2013, dimana Geografi tidak termasuk mata pelajaran yang wajib diajarkan, akan tetapi hanya menjadi pilihan semata. Pertanyaan yang muncul, apakah untuk menjaga kedaulatan negara merupakan pilihan semata atau menjadi sangat wajib bagi setiap individu bangsa?

Prof. Dr. Suratman, M.Sc.
(Ketua Umum IGI)



Peran Geograf (*Why Care*) untuk pembangunan berkelanjutan akan menuntun keberadaan NKRI. Penyebaran dan peningkatan SDM Geografi keseluruhan wilayah NKRI menjadi suatu keharusan dan mendesak.

Ir. Idwan Suhardi, Ph.D
(Staf Ahli Kemristek RI Bidang Energi Sumberdaya & Material Maju)



Informasi Geospasial membantu penyiapan SDM Geospasial yang terdiri dari Sarjana Geografi dan Sarjana Pendidikan Geografi. Oleh karena itu UU Informasi Geospasial menjadi modal utama para geografer baik sebagai profesional geografi maupun profesional pendidik geografi dalam membangun Kecerdasan Geospasial Nasional.

Dr. Asep Karsidi, M.Sc.
(Kepala Badan Informasi Geospasial)